

Pelibatan Unsur Perilaku Sebagai Evaluasi Pasca Huni Pada Pembangunan Rumah Sehat Bersubsidi

Intan Rahmawati

Rafidah Riahta

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Abstract.

Changes in the global scope has occurred in developing countries, include in Indonesia. There are several consequences from those large changes, for example the development of shopping center and housing. Malang is one of the cities which experiencing the problem of housing. There are thousands of small housing encountered on the outskirts of this city. Government attempts to make a program which provides lower to midle level society with healthy and subsidized housing, so they do not need to rent a house anymore. Evaluation of post-occupancy is a systematic evaluation process after housing was built and occupied for several years. This evaluation conducted to evaluate the effectiveness of the program. This evaluation consist of three elements. First, the healthyness element, which consists of technical design issues such as health, safety and security aspects for the users of the building. Second, the functional element which relates with to what extent the users able to operate efficiently and effectively in the house. Third, the behavioral elements: to what extent psychological and sociological aspect of users are influenced by the house design. The existence of building which is too simple, forces the occupant to adapt with their environment of housing subsidies.

Keywords: *Evaluation of Post Occupancy, Behavior Elements, Subsidized Housing*

Abstrak.

Perubahan dalam skala global terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa konsekuensi dari perubahan secara besar-besaran tersebut, misalnya mengenai dampak pusat perbelanjaan dan perumahan. Malang adalah salah satu kota kecil yang mengalami problem perumahan. Di pinggiran kota ini sudah banyak ditemui sejumlah perumahan kecil yang jumlahnya ribuan unit. Pemerintah berupaya untuk memberikan sebuah program rumah murah bersubsidi yang bertujuan agar masyarakat menengah kebawah dapat memilikinya tanpa harus mengontrak. Evaluasi pascahunian adalah proses evaluasi sistematis setelah perumahan dibangun dan diduduki beberapa tahun. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini berhasil. Evaluasi pascahunian dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama mengenai aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan penghuni. Kedua mengenai nilai fungsional, yakni sejauh mana rumah tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif. Ketiga adalah mengenai bagaimana aspek psikologis dan sosiologis berpengaruh dalam desain bangunan (Preiser, 1988). Eksistensi bangunan yang terlalu sederhana, menuntut para penghuni harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Kata Kunci: *Evaluasi pascahunian, unsure perilaku, rumah bersubsidi*

Korespondensi: **Intan Rahmawati.** Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Gedung FISIP Lt. 3. Jl. Veteran Malang 65145. Email : intan_dps@yahoo.com atau rriahta@yahoo.com

Setiap manusia menjadikan rumah sebagai kebutuhan pokok selain kebutuhan makanan dan pakaian. Dimanapun manusia berada, mereka akan membutuhkan sebuah tempat tinggal yang berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga dan rumah yang juga merupakan lambang sosial (Keenan, 2005).

Wilayah perkotaan memandang lingkungan sebagai dasar dalam membuat desain perwilayahan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang telah ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang biasanya disebut lingkungan alam (contohnya pegunungan, lautan dan hutan) ataupun lingkungan yang diciptakan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang disebut lingkungan buatan (contohnya waduk, pemukiman, lahan pertanian). Perumahan mempunyai kontribusi fisik terbesar pada lingkungan buatan dan menempati ruang kota terbanyak. Hal ini dikarenakan perumahan tidak hanya sekedar bangunan fisik yang memberi naungan terhadap penghuni rumah tersebut, melainkan setiap elemen-elemen fisik yang terdapat pada masing-masing rumah menentukan sebaik apa para penghuninya diakomodasikan, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya dan juga menentukan elemen lokasi yang menjadi acuan dasar menempatkan lokasi pusat perbelanjaan ataupun sekolah, serta menentukan unsur status individu. Unsur status adalah unsur-unsur yang mempengaruhi penilaian orang lain kepada individu berdasarkan dimana individu tersebut tinggal.

Perumahan telah berkembang menjadi suatu proyek yang mencakup dalam berbagai peranan pihak dan bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan menjadi lahan bisnis yang cukup menggiurkan.

Kota Malang merupakan salah satu contoh kota kecil yang telah mengalami perubahan sosial dalam pembangunan perumahan. Pertumbuhan permintaan pada pasar perumahan kian menjadikan harga pada bisnis perumahan cenderung melambung. Oleh karena itu, di pinggir kota yang saat ini masih jauh dari perhatian para *developer*, pemerintah menerapkan kebijakan rumah sehat yang

bersubsidi untuk membantu masyarakat kategori menengah kebawah untuk memiliki rumahnya sendiri tanpa harus menyewanya lagi.

Tanah merupakan variabel tetap terbatas yang tidak bisa diperluas ataupun ditambahkan jumlahnya, akan tetapi tingkat permintaan masyarakat terhadap tanah tersebut sebagai lahan huni semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Inilah yang menyebabkan harga tanah mengalami kenaikan. Harga tanah di perkotaan yang semakin meningkat menjadikan masyarakat melirik harga tanah di pinggir perkotaan yang masih belum mengalami peningkatan. Perumahan sehat bersubsidi yang terletak di daerah pinggir perkotaan dan cenderung miring harganya membuatnya menjadi lokasi rebutan masyarakat.

Keenan menyimpulkan bahwa rumah sehat bersubsidi ini tidak sepenuhnya menyehatkan penghuni rumah tersebut. Rumah sehat bersubsidi hanya memiliki luas bangunan ukuran 27m² dengan rancangan dua kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu serta 1 dapur. Kondisi ini mungkin setara dengan yang dikeluarkan dari penghasilan penghuni yaitu 60 juta. Akan tetapi, rumah sehat bersubsidi ini merupakan program pemerintah dengan cara membayar setengah harga dari harga asli rumah tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah tersebut sebenarnya berkisar seharga 120-150 juta. Semakin lama perumahan sehat bersubsidi ini memang diletakkan di pinggir perkotaan dan menjadikan penghuninya sulit untuk bermobilisasi menuju kota yang merupakan pusat dari aktivitas sehari-hari penghuni baik untuk bekerja ataupun mengurus surat-surat (Keenan, 2005).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen dan berperan aktif dalam mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat perkotaan yang memiliki penghasilan rendah dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan dan kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli menyebutkan bahwa pengeluaran yang sering dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pengeluaran untuk tempat tinggal (Rusli, 2010).

Rumah sehat bersubsidi merupakan sebuah kebijakan yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk segera

mendapatkan kebutuhan bertempat tinggal. Permasalahan yang biasanya muncul dalam pembangunan rumah sehat bersubsidi adalah rancangan dan bahan yang dipakai dalam membangun rumah dinilai kurang kuat untuk menjaga keawetannya. Beberapa kasus menyatakan bahwa rumah sehat bersubsidi tersebut harus direnovasi dalam sisi tertentu minimal 1,5 tahun pertama.

Kerusakan yang paling sering terjadi didalam perumahan sehat bersubsidi adalah kurang adanya jarak yang cukup lebar pada saluran air didepan rumah sehingga terjadinya peluapan air ketika curah hujan tinggi di daerah kota Malang. Hal ini diperkuat dengan kondisi geografis jika terdapat perumahan yang berlokasi menurun ke arah sungai. Kerusakan yang juga sering terlihat di perumahan ini adalah kualitas cat yang mulai mengelupas baik di dinding rumah, pagar bahkan di atap. Kurangnya lahan bermain bagi anak dan akses menuju perumahan yang menunjukkan adanya kerusakan jalan juga merupakan masalah dalam perumahan bersubsidi.

Kondisi jarak antar rumah yang terlalu dekat dalam perumahan bersubsidi menjadikan penghuni rumah mengalami kesulitan dalam mengembangkan kelekatatan terhadap rumah yang ia huni. Selain itu, keadaan ini tentunya akan menimbulkan permasalahan terhadap hubungan bertetangga.

Peiser, dkk (1988) menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berencana seperti yang digalakkan pemerintah perlu adanya evaluasi pasca pembangunan setelah beberapa tahun kemudian. Hal ini berfungsi untuk menunjang perancangan pembangunan berikutnya. Dalam evaluasi tersebut terdapat tiga bagian yang menjadi fokus utama (Snyder, 1994).

Pertama, unsur teknik yaitu unsur yang berhubungan dengan latar belakang bangunan atau desain teknis seperti kesehatan, keamanan dan kesejahteraan. Unsur ini adalah unsur yang paling mudah dievaluasi dikarenakan unsur teknik berhubungan dengan alat-alat sehingga hasil evaluasi bersifat objektif. Unsur teknik ini seringkali terabaikan dikarenakan perhatian kita cenderung terhadap unsur fungsionalnya. Padahal unsur teknik yang terabaikan akan membahayakan penghuninya. Oleh karena itu, unsur teknik ini harus dilakukan dengan benar

sejak awal. Unsur teknik yang paling umum dinilai adalah dinding luar, atap rumah, pengamanan terhadap kebakaran, struktur bangunan, pencahayaan, udara, kebisingan dan interior (lantai, dinding dan *platform*)

Kedua, unsur fungsional yang berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas. Unsur fungsional merupakan aspek yang langsung menunjang kegiatan penghuni. Desain yang tidak memuaskan dapat merintang fungsi dan menyebabkan kerugian atas ketidaktepatan. Penghuni yang merasa adanya ketidakefisiensi dalam desain akan melakukan renovasi dari rumahnya ataupun merengubah posisi interior rumah tersebut.

Ketiga, unsur kebiasaan yaitu unsur yang menekankan hubungan antara perilaku dan lingkungan fisik. Evaluasi dalam hal kebiasaan ini lebih terlihat saat kita melihatnya dari aspek psikologis dan sosiologis yang menyatakan bahwa kebiasaan penghuni ini terpengaruh oleh desain lingkungan.

Rumah yang merupakan tempat tinggal dengan beberapa fungsi dasarnya akan mempengaruhi penghuninya secara positif jika penghuni rumah tersebut memiliki kelekatatan terhadap rumahnya. Dengan kelekatatan yang timbul dari penghuninya, penghuni tersebut akan dengan mudah mengerti penyebab dan solusi yang selama ini menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kelekatatan timbul dari afektif positif yang timbul dari hubungan personal dengan lingkungan rumah mereka. Kelekatatan penghuni dengan rumah yang dihuninya dipengaruhi oleh rasa nyaman dan keamanan yang dirasakan penghuninya. Kenyaman penghuni rumah tersebut dilihat dari teritorial seseorang terhadap rumah ataupun tempat yang dia huni.

Menurut teori *Human Territories*, terdapat tiga jenis 3 kategori teritori manusia terhadap rumah ataupun tempat dia beraktivitas. (McAndrew, 1993). Pertama adalah *primary territories* yaitu rumah ataupun tempat individu beraktifitas memberikan rasa memiliki individu tersebut dan adanya kesempatan dalam mengontrol tempat tersebut (merenovasi, mengatur ulang). Biasanya teritori ini terdapat pada rumah, kantor ataupun kelas. Dalam kategori ini, masing-masing individu didalam tempat tersebut juga memiliki teritori individu, seperti

anak memiliki teritorinya sendiri saat berada di kamarnya. Dengan adanya teritori keluarga dan teritori masing-masing individu menjadikan anggota keluarga memiliki kelekatan terhadap rumah yang mereka huni dan sifat bergotong-royong dalam merawat rumah tersebut. Kedua, *secondary territories* yaitu kurang adanya rasa memiliki penghuni didalam rumah yang dia huni tersebut. Selain itu penghuni kurang merasakan adanya kekuasaan untuk mengontrol tempat itu ataupun kurang adanya rasa eksklusif dalam mengelola teritorinya. Hal ini biasanya terjadi pada penghuni di dalam rumah kontrakan ataupun rumah yang berada dipinggir jalan utama perumahan, jalan raya ataupun tidak memiliki jarak yang memadai dalam memisahkan antar rumah didalam perumahan tersebut (McAndrew, 1993). Ketiga, *public territories* yaitu teritori yang bersifat sementara dan berada di ruang publik. Teritori ini biasanya hanya bersifat sementara ketika individu berada di dalam lingkungan tersebut, seperti di meja kafe, perpustakaan, tempat duduk di kereta api.

Evaluasi pasca huni tidak akan berjalan dengan baik jika kita kurang memperhatikan *ambient environmental* dan *architectural features*. *Ambient environmental* merupakan kualitas fisik dari lingkungan yang mengelilingi individu seperti suara, cahaya/penerangan, warna, kualitas udara, temperatur dan kelembaban. Selain kebisingan, temperatur yang kurang bersahabat pada aktivitas penghuni juga bisa dirasakan penghuni ketika di dalam rumah.

Pemukiman Sehat bersubsidi

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya persediaan air, pembuangan sampah dan saluran pembuangan air yang benar dan fasilitas umum yang menunjang lainnya.

Setiap perencanaan desain kota, perumahan berada dalam bagian pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan ataupun pedesaan. kawasan pemukiman biasanya didominasi oleh lingkungan hunian yang memang memiliki fungsi utama

sebagai tempat tinggal dan didukung oleh adanya sarana lingkungan, seperti halnya taman, tempat rekreasi, pemakaman dan tempat perbelanjaan. (UURI No.4/1992)

Menurut Komaruddin (1996) perumahan sederhana adalah sekelompok tempat kediaman yang pada tahap awalnya dibangun dengan menggunakan bahan bangunan berkualitas sederhana dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial (Akhmad, 2011)

Konsep pembangunan rumah sederhana dengan dukungan fasilitas KPR bersubsidi BTN pemerintah mulai diperkenalkan sejak bulan Agustus 1991 dan telah digunakan hampir seluruh masyarakat yang memiliki rumah di kawasan perumahan. Akan tetapi, pergerakan pembangunan rumah sederhana bersubsidi dimana pemerintah mensubsidikan dana pembangunan rumah ini baru digalakkan pada tahun 2008. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat kota, khususnya yang berpenghasilan rendah (Akhmad, 2010).

Perumahan tidak hanya difokuskan pada bangunan fisik rumah penghuni semata. Akan tetapi, perumahan juga harus memiliki desain penataan kelengkapan dasar fisik lingkungan, seperti pembuangan sampah, listrik, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor kelengkapan dasar fisik lingkungan yang dapat meningkatkan standart kesehatan penghuninya. Menurut *American Public Health Association* (APHA) rumah dikatakan sehat apabila : (1) Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara di luar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, dan kebisingan 45-55 dB.A.; (2) Memenuhi kebutuhan kejiwaan; (3) Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangansampah dan saluran pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan; serta (4) Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari

ancaman kecelakaan lalu lintas. (Keenan, 2005)

Oleh karena itu selain mempertimbangkan kebutuhan fisik dasar, perumahan juga harus memenuhi kebutuhan kejiwaan dan kelengkapan fisik dasar. Kebutuhan jiwa terkadang terabaikan pada saat pembangunan perumahan tersebut. Kebutuhan jiwa dalam membentuk konsep rumah sehat adalah rumah tersebut mampu memenuhi persyaratan psikologis penghuni tersebut. persyaratan psikologis tersebut adalah: 1) cukup aman dan nyaman bagi masing-masing penghuni didalam rumah tersebut, 2) penataan perabotan yang sesuai dengan kondisi rumah tersebut, 3) tidak *over crowding* (seperti anak laki-laki tidak boleh ditempatkan dalam satu kamar dengan anak perempuan, remaja memiliki kamar tersendiri, anak berumur 2 tahun sebaiknya masih satu kamar dengan kedua orangtuanya) (Keman, 2005).

Kebijakan pembangunan rumah sederhana yang dirancang pemerintah dengan dukungan fasilitas KPR sejak tahun 1991 ternyata belum mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat kota yang berpenghasilan rendah. Fasilitas KPR hanya mampu digunakan kepada masyarakat kota berpenghasilan sedang dikarenakan cicilan ataupun harga yang ditawarkan oleh pemerintah dengan dukungan KPR bersubsidi BTN ini masih sulit dijangkau oleh masyarakat kota berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan Rumah sehat bersubsidi sejak tahun 2009. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal tempat tinggal bagi masyarakat kota berpenghasilan rendah.

Dalam data yang dimiliki Kementrian Negara Perumahan Rakyat pada tahun 2011 menyatakan bahwa pembangunan rumah sehat bersubsidi ini sangat berperan dalam pemenuhan hak tempat tinggal rakyat sebesar 70-80%. Pemerintah juga bekerjasama dengan Koperasi sebagai lembaga penerbit kredit dalam program kredit perumahan bersubsidi ini, khususnya dalam hal perbaikan. Pemerintah bekerja sama dengan Koperasi sebagai lembaga penerbit kredit bertujuan untuk memudahkan masyarakat kota berpenghasilan rendah untuk mencicil biaya pembangunan rumah sehat bersubsidi tersebut dan berfungsi untuk memajukan perekonomian daerah melalui koperasi.

Evaluasi Pasca Huni dalam Pembangunan Perumahan.

Menurut Sudibyo (1989), evaluasi pasca huni merupakan kegiatan berupa pengkaji (peninjauan) kembali (evaluasi) terhadap bangunan-bangunan dan atau lingkungan binaan yang telah dihuni. Evaluasi pascahuni sangatlah penting untuk menunjang pembangunan selanjutnya baik dari sisi penghuni ataupun sisi pemerintah dalam kasus rumah sehat bersubsidi. Kekurangan, kelebihan serta kondisi lingkungan perumahan tersebut akan menjadi perhatian daripada evaluasi pasca huni (Snyder, 1994).

Menurut Danisworo (1989), manfaat dan keuntungan dilakukannya evaluasi pasca huni adalah: 1) identifikasi dan solusi masalah dalam fasilitas yang bersangkutan, 2) pengelolaan fasilitas yang tanggap terhadap nilai pemakai, 3) peningkatan pemamfaatan ruang dan sikap pemakai bangunan pascaproses evaluasi, serta 4) adanya masukan dan pengertian yang lebih baik akan konsekuensi suatu rancangan dan renovasi bangunan tersebut.

Evaluasi pascahuni memiliki tiga tahapan, yaitu: 1) perencanaan, yaitu membuat rancangan evaluasi berupa perumusan tujuan, sasaran dan teknis evaluasi, 2) pengaturan pelaksana, yaitu kegiatan dalam merumuskan temuan, analisi dan menyusun rekomendasi evaluasi, serta 3) pelaporan hasil yaitu tindak lanjut atau implementasi setelah melakukan evaluasi pascahuni.

HASIL DAN BAHASAN

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya persediaan air, pembuangan sampah dan saluran pembuangan air yang benar dan fasilitas umum yang menunjang lainnya.

Rumah memiliki fungsi yang menjamin adanya keamanan, keefisienan dan faktor psikis penghuninya. Ketika penghuni merasa kurangnya

jaminan yang diberikan oleh rumah yang dia huni, penghuni tersebut merenovasi ataupun mengatur ulang rumah tersebut agar dapat menjamin keamanan, keefisienan dan faktor psikis penghuninya. Menurut UU RI No. 4 tahun 1992, wilayah pemukiman terbagi menjadi dua wilayah, wilayah hunian dan wilayah yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perikehidupan dan penghidupan yang tertera dalam UU RI No. 4 tahun 1992 adalah segala fasilitas yang mendorong sisi sosial dan ekonomi masyarakat tersebut, seperti pusat perbelanjaan, puskesmas/rumah sakit, tempat bekerja, taman dan sarana transportasi. Hasil dari pengamatan di beberapa perumahan, masyarakat cenderung mengupayakan adanya pemeliharaan rumah tanpa memperhatikan pemeliharaan lingkungan rumah mereka yang mendukung. Padahal dalam evaluasi pasca huni, unsur kebiasaan menjadi unsur yang cukup dominan dalam menyeimbangkan perilaku dengan lingkungan fisik, tidak hanya pada lingkungan rumah saja.

Meskipun unsur teknis dan unsur fungsional telah memberikan hasil-hasil yang sering terjadi dalam klausul sebab-akibat, evaluasi pasca huni akan bersifat renggang dan sukar dipahami jika tidak melihat aspek unsur kebiasaan yang merupakan unsur dominan yang mempengaruhi manusia meskipun tidak dapat dilihat dampak efeknya secara langsung. Menurut *Human Territories*, unsur kebiasaan yang terlihat di dalam perumahan tersebut adalah adanya *secondary territories* dimana penghuni kurang merasakan kemampuan mengontrol lingkungan ataupun rasa privasi dalam beraktifitas. Jarak antar rumah yang terlalu dekat menjadikan penghuni di dalamnya sedikit terganggu dengan aktifitas tetangganya.

Ketidaknyamanan yang dirasakan penghuni akan mengakibatkan stres terhadap lingkungan yang timbul akibat afektif negatif yang terjadi pada kehidupan individu. Unsur kebiasaan ini bisa terselesaikan dengan cara memastikan dan mencari penyebab dari semua permasalahan yang ada. Ini bertujuan agar penghuni dapat memunculkan kelelahan pada huniannya (Bell, 2001). Ketidaknyamanan ini dapat dilakukan dengan cara menata ulang letak perabotan sehingga mampu memberikan efek psikis baru pada penghuni.

Masalah lain dalam lingkungan perumahan

adalah temperturnya. Menurut Anderson (1987), tingkah laku sosial dapat dipengaruhi oleh temperatur lingkungan yang ada. Semakin hangat temperatur di lingkungan tersebut akan membuat individu merasa nyaman atas lingkungan tersebut. Akan tetapi, semakin panas ataupun dingin kondisi lingkungan tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan individu didalam lingkungan tersebut. Bahkan lingkungan dengan temperatur yang sangat panas akan menyebabkan individu tersebut kurang memperdulikan kondisi sosial sekitar dan meningkatkan rasa agresi individu tersebut (McAndrew, 1993).

Temperatur yang tinggi dan ketidaknyamanan yang dirasakan penghuni selama beraktifitas di rumah tersebut akan mendorong penghuni untuk kurang memperdulikan kondisi sosial disekitarnya dan secara tidak sadar, agresifitas penghuni tersebut meningkat sehingga menyebabkan penghuni tersebut mudah terpancing amarah, tidak mampu melakukan aktivitas dengan baik dan sebagainya. Penghuni rumah di perumahan tersebut bisa meminimalisir temperatur rumah dan lingkungan sekitarnya dengan cara menanam beberapa tanaman hias di dalam pot untuk menyelesaikan permasalahan ketiadaan lahan tanam. Dengan adanya tanaman pot yang berada di sekitar rumah akan menciptakan keindahan dan keasrian dari rumah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan, evaluasi pascahuni merupakan kegiatan yang harus dilakukan penghuni perumahan bersubsidi untuk mengkaji berbagai permasalahan yang timbul selama tinggal di rumah tersebut. Evaluasi pascahuni bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tersebut dan meningkatkan rasa kelelahan penghuni terhadap rumah yang dia huni.

PUSTAKA ACUAN

- Bell, P. A. (2001) *Environmental psychology*. Orlando: Harcourt, Inc.
- Catanese, A. J & Snyder, J. C. (1979). *Pengantar perencanaan kota*. Milwaukee: University of Wisconsin.
- Keenan, S. (2005). Kesehatan perumahan dan lingkungan perumahan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 2 No.1*, 29-42.
- Macionis, J. J. (2002). *Social problems*. New Jersey: Pearson Education.
- McAndrew, F. T. (1993). *Environmental psychology*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Prawitasari, J. E. (2012). *Psikologi terapan: Melintas batas disiplin ilmu*. Jakarta: Erlangga.
- Rusli (2010). Dukungan lembaga keuangan bagi program pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Luwuk. *Jurnal 'Ruang' vol.2 no.1*, 47-55.
- Snyder, J. C. & Catanese, A. J. (1994). *Pengantar arsitektur*. Milwaukee: University of Wisconsin.